

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan konselor di sekolah menengah atas (SMA) dewasa ini sangat diperlukan, mengingat banyaknya masalah dihadapi oleh siswa/siswi yang secara umum sedang berada pada masa remaja. Menurut Soekamto (1987), masa remaja merupakan masa yang penuh dengan kesulitan-kesulitan, karena pada masa ini merupakan transisi dari masa kanak-kanak yang telah ditinggalkan, tetapi mereka belum dapat diterima sebagai orang dewasa. Remaja diombang-ambingkan oleh munculnya kekecewaan dan penderitaan, meningkatnya konflik, krisis penyesuaian diri, impian dan khayalan, serta keterasingan dari kehidupan orang dewasa dan norma-norma budaya. Pada masa ini siswa akan mengalami berbagai goncangan yang akan mempengaruhi seluruh pola perilakunya dan secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi proses dan hasil belajarnya (Simanjuntak dan Pasaribu, 1984).

Kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua siswa mampu mengatasi permasalahannya sendiri. Bagi siswa yang menyadari keterbatasan kemampuannya dalam menyelesaikan masalah, akan berusaha untuk meminta bantuan pihak guru atau konselor sekolah. Sebaliknya siswa yang tidak menyadari hal itu, maka sangat diharapkan peran konselor sekolah untuk membantu secara aktif menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Dalam hal ini konselor sekolah dituntut untuk melaksanakan tugasnya, yaitu memberikan layanan yang sebaik-baiknya bagi

siswa, sehingga siswa dapat berkembang secara optimal menjadi pribadi-pribadi yang mandiri.

SK Menpan No. 84/93 dan Mendikbud No. 0433/P/93 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dijelaskan bahwa konselor sekolah adalah merupakan tenaga khusus yang ditugaskan untuk menangani bidang bimbingan dan konseling di SLTP dan SMA. Menurut Sukardi (1994), tenaga ini disebut “ *full time guidance counselor*”, karena seluruh waktu dan perhatiannya dicurahkan pada pelayanan bimbingan dan konseling, dan karena dialah yang menjadi penyuluh utama di sekolah. Konselor sekolah telah dipersiapkan secara formal melalui lembaga atau institusi pendidikan yang berwenang, sehingga dapat menguasai seperangkat kompetensi yang diperlukan untuk pekerjaan bimbingan dan konseling di sekolah.

Penanganan siswa dalam bimbingan dan konseling umumnya diartikan sebagai penanganan siswa bermasalah, dan prestasinya jauh berada dibawah pencapaian teman-temannya. Pandangan yang demikian mengartikan istilah penanganan siswa secara sempit. Penanganan siswa secara luas tidak hanya menyangkut siswa yang bermasalah misalnya: melanggar aturan sekolah, melawan guru di sekolah, *slow learner*, *underachiever* dan lain-lain, tetapi juga menyangkut penanganan siswa yang menunjukkan prestasi tinggi.

Salah persepsi mengenai penanganan siswa mungkin disebabkan oleh salah mempersepsi pada salah satu prinsip bimbingan dan konseling yang menyatakan bahwa bimbingan dan konseling diberikan pada semua siswa. Disamping masalah-masalah seperti tersebut di atas, Rochman (dalam Willis, 2004) melihat bahwa sering terjadi salah pengertian terhadap bimbingan dan konseling, baik dikalangan para guru